

**TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING  
DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI  
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**ABSTRAK**

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh sektor ekonomi maupun pariwisata. Untuk meningkatkan pemasukan negara di sektor pariwisata maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Disamping tujuan ekonomi yang hendak dicapai oleh kebijakan BVK tersebut, terdapat permasalahan dimana diduga meningkatkan kemungkinan ancaman tehadap negara. Penelitian akan mengkaji berbagai macam dampak positif dan negatif yang diterima khususnya adalah semakin banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Indonesia.

Metode yang akan dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan teknik pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang dengan menggunakan data sekunder agar dapat memaparkan dan mendeskripsikan berdasarkan peraturan yang berhubungan dengan Kebijakan BVK terutama yaitu Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

Dengan pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan maka kesempatan bagi orang asing untuk menjadi TKA ilegal semakin terbuka maka dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat maupun sanksi yang lebih berat dari pemerintah untuk menanggulanginya agar tenaga kerja lokal tidak terkesampingkan oleh TKA ilegal. Pada dasarnya pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu caranya yaitu menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: *Kebijakan Bebas Visa, Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing*

**JURIDICAL REVIEW THE FOREIGN WORKERS CONTROL RELATED TO  
THE VISIT VISA EXEMPTION POLICY BASED ON THE PREVAILING LAWS  
AND REGULATION IN INDONESIA**

**ABSTRACT**

Indonesia has a wealth of natural resources that can be utilized by the economic and tourism sectors. To increase the country's income in the tourism sector, the government issued Presidential Regulation No. 21 of 2016 on The Visit Visa Exemption (Free Visa Policy). In addition to the economic objectives to be achieved by Free Visa Policy, there are problems where it is suspected to increase the threats against the country. This Research will search various positive and negative impact received by Country especially the increasing number of illegal foreign workers in Indonesia.

The method that will be used by the researcher in this research is normative juridical, while the approach technique that will be used is the legislation approach by using secondary data in order to explain and describe based on the prevailing laws and regulations about Free Visa Policy especially Regulation No 13 of 2003 on Employment, Regulation No 6 of 2011 on Immigration and Presidential Regulation No 21 of 2016 on The Visit Visa Exemption.in Indonesia.

The enforcement of the Free Visa Policy makes the opportunity for foreigners to become illegal foreign workers increasingly open, therefore more stringent oversight and more severe government sanctions are needed to address them so that local labor is not ruled out by illegal foreign workers. Basically the government has a responsibility to improve the welfare of the community, one of the ways is to ensure the availability of employment for all Indonesian people.

Keywords: *Visa Free Policy, Employment, Foreign Workers*

## DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Keaslian.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing .....	ii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang .....	iii
Persetujuan Revisi.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konseptual .....	17

F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23

## **BAB II KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI INDONESIA .....27**

A. Sistem Keimigrasian di Indonesia.....	27
1. Pengertian Imigrasi.....	27
2. Fungsi Imigrasi .....	28
a. Fungsi Pelayanan Masyarakat .....	29
b. Fungsi Penegakan Hukum .....	30
c. Fungsi Keamanan Negara.....	31
d. Fungsi Fasilitator Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat.....	32
B. Kebijakan Orang Asing Tinggal di Indonesia.....	33
1. Pengaturan Keberadaan Orang Asing yang Masuk dan Keluar di Wilayah Indonesia.....	33
2. Tindakan Administratif Keimigrasian.....	39
C. Kebijakan Bebas Visa di Indonesia.....	40

## **BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN**

### **TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA.....49**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tenaga Kerja Asing (TKA).....	49
B. Konsep Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia .....	53

C. Pembatasan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia .....	62
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI INDONESIA.....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang Diberikan Pemerintah Melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.....	69
1. Tujuan Negara Membentuk Kebijakan Bebas Visa (BVK) Kunjungan .....	69
2. Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia .....	72
B. Pengawasan dan Sanksi Hukum Terhadap Orang Asing Yang Menyalahgunakan Visa Kunjungannya Menjadi Tenaga Kerja Ilegal di Indonesia .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>